



Kawal Relokasi PKL Malioboro untuk Memakmurkan Pedagang

TAJUK

Lebih dari 1.800-an pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang jalur pedestrian Malioboro mulai direlokasi ke tempat baru.

Mereka akan menempati lapak di eks Gedung Bioskop Indra dan bekas kantor Dinas Pariwisata DIY di Jalan Malioboro. Dua tempat itu dinamai Teras Malioboro. Tahapan pemindahan PKL mulai dilakukan dengan menggelar Wilujengan atau selamatan pada Rabu (26/1) lalu.

Dalam momentum *Wilujengan*, pemerintah daerah berjanji jumlah PKL

tidak akan bertambah dan di selasar Malioboro juga dijamin tidak akan ada PKL lagi.

Pemerintah mengklaim tujuan pemindahan itu untuk memulihkan Malioboro. Pemda juga memberikan sejumlah fasilitas gratis seperti retribusi dan pajak ke PKL selama setahun.

Tidak hanya itu, pemerintah juga berjanji mengagendakan sejumlah acara di selter PKL untuk menarik pengunjung agar lapak pedagang tak sepi pembeli.

Relokasi PKL Malioboro bagaimana pun kini

sudah berjalan, terlepas masih ada pro dan kontra terhadap kebijakan ini.

Terpenting ke depan tinggal bagaimana memastikan masa depan para PKL setelah menempati lapak baru.

Pemerintah perlu memastikan masa depan para PKL tak menemui hal suram setelah berjualan di tempat baru. Pemda harus konsisten dengan janji program yang sudah dijanjikan termasuk memberikan fasilitas bagi PKL.

Penting pula memaksimalkan sosialisasi dan promosi keberadaan

Teras Malioboro ini ke publik agar kunjungan bisa maksimal. Jangan sampai kebijakan relokasi PKL yang diklaim memulihkan Malioboro ini justru menimbulkan persoalan baru yakni merosotnya kesejahteraan ribuan PKL tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu konsisten menjaga jalur pedestrian Malioboro bebas pedagang. Jangan sampai, sudah ada kebijakan relokasi, tapi masih ada "pasar dadakan" di jalur pedestrian.

Koordinasi dan komunikasi dengan

paguyuban PKL perlu diintensifkan untuk memastikan jangan ada hal-hal yang tidak konsisten. Bagaimana pun kebijakan yang baik adalah kebijakan yang sarat partisipasi warga. Relasi antara pemerintah dan pedagang perlu terjalin dengan baik untuk sama-sama sepakat dan bekerja keras menyukseskan relokasi dan menjamin tercapainya kesejahteraan warga.

Pada prinsipnya niat baik pemerintah memulihkan Malioboro, mengembalikan sumbu filosofis Jogja akan menjadi sia-sia

bila ada kesejahteraan warganya yang terabaikan karena strategi kebijakan yang keliru. Publik tentu berharap, dapat berwisata ke Malioboro dengan nyaman dengan pedestrian yang ramah pejalan kaki, namun di sisi lain kesejahteraan masyarakat kecil tetap terjamin.

Publik juga perlu terlibat aktif dan berpartisipasi mengawal Malioboro menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk berwisata dan menjadi rumah bersama bagi semua orang yang ada dan berkunjung ke Jogja.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005